

Mahfud MD Surati KPK Minta Turut Serta Dalam SPPTI Untuk Cegah Kewenangan dan Kongkalikong Penanganan Perkara



Realitarkyat.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD, menilai penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut serta dalam Sistem Database Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPTI).

KPK, kata dia, perlu terlibat dalam sistem itu untuk mencegah kewenangan dan kongkalikong penanganan perkara.

“Selama ini sudah dijalankan pemerintah, terutama Kejaksaan, Kepolisian dan Mahkamah Agung. (KPK perlu ikut kerja sama) guna mencegah penghapusan kekuasaan dan kongkalikong penanganan perkara,” kata Mahfud, Selasa (13/4/2021).

Mahfud berkata, KPK sudah melakukan langkah tepat dengan melakukan pencegahan, dan memberikan penyuluhan hukum, dan juga bimbingan teknis dalam pengelolaan anggaran.

Dia mengaku dengan laporan tahunan KPK pada tahun 2020 lalu.

“Pencegahan dan penindakan menjadi satu kesatuan amanat UU yang harus dilakukan KPK. Dan saya bekerja tahun kemarin laporan tahunan KPK, yang berhasil menyelamatkan aset dan kekayaan negara dari korupsi senilai lebih dari Rp570,” ujar Mahfud.

Terkait Stranas Pencegahan Korupsi, Mahfud mengatakan, KPK perlu melihat SPPTI.

Saat ini, terdapat lebih dari 212 kabupaten kota di dalam penanganan database perkara itu.

Tindak pidana kejahatan, tindak pidana umum, jaringan ini dirancang agar dapat juga perkara korupsi, kejahatan anak, dan lainnya.

“Saya berpikir kerja sama SPPTI ini agar masyarakat tahu sudah sampai mana perkara, sehingga juga pengawasan KPK jadi lebih mudah. KPK punya wewenang menyupervisi perkara yang tidak lancar di Kejaksaan dan Kepolisian, KPK lebih lancar jika bergabung,” kata Mahfud.

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga mengapresiasi kiprah KPK selama ini, bahwa KPK bisa berperan penting.

“Negeri ini punya semangat korupsi sejak era reformasi. Sehingga dengan semangat dibentuk KPK,” kata Mahfud.(ilm)